

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra OPD dan mengacu kepada OPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 nantinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem

Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 15 Nopember Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 )Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Menurunkan kesakitan akibat penyakit
4. Meningkatkan jumlah, jenis , mutu dan penyebaran sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
5. Terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

## 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

# BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturanperundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelas kanapa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
3. Tantangan danpeluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukanya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan programdan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atauprogramdan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
2. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
  - 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  - 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - 3) Sajikan Tabel T-C.32

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. misalnya:
  - Pencapaian visi dan misi kepala daerah
  - Pencapaian SDGs,
  - Pengentasan kemiskinan,
  - Pencapaian NSPK dan SPM,
  - Pendaan guna potensi ekonomi daerah,
  - Pengembangan daerah terisolir, dsb.

- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- 4) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C. 33

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 3) Rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara lintas sektor, lintas program dan masyarakat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2021 Kabupaten Karangasem sesuai tabel T-C.29 terlampir.

Berikut data tentang evaluasi kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dengan indikator jumlah rumah dinas yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas, target 3 unit namun realisasi 1 (Satu) unit hal disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada.
  - 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dengan indikator Persentase terpenuhinya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan capaian (78,95%) tahun 2018 masih di bawah target (100%) karena Pemerintah Kabupaten Karangasem UHC mulai tahun 2019.
  - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dengan indikator jumlah Rumah Dinas yang mendapatkan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas, karena keterbatasan anggaran sehingga terealisasi 1 (Satu) dari target 3 unit.

- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Persentase RT berperilaku hidup sehat, target tahun 2018 sebesar 82 % dan realisasi 80,1%, kesadaran masyarakat masih rendah untuk membiasakan dirinya berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang sering tidak terpenuhi adalah
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, indikatornya Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium target 82% dengan capaian 62,69%. Tahun 2018 persediaan garam beryodium di pasaran langka dan bahkan di beberapa pasar sempat tidak ada.
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, kegiatan Peningkatan Kualitas Air dan Lingkungan dengan capaian beberapa indikator output maupun outcome belum mencapai target, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang sanitasi.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia, kegiatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan dengan indikator persentase lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar target 100% realisasi 65,44% karena kurangnya kesadaran Lansia untuk datang ke pelayanan kesehatan atau Lansia tidak ada yang mengantarkan ke tempat pelayanan kesehatan.
- 8) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, indikator output Persentase kunjungan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) karena kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya pada triwulan pertama masih rendah sehingga tidak masuk dalam capaian K4. Capaian indikator persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar masih di bawah target karena Balita yang sudah selesai mendapatkan imunisasi beberapa dari mereka tidak datang lagi ke pelayanan kesehatan/Posyandu.
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular, Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Deteksi dini penyakit tidak menular, beberapa indikator outcome dan output masih di bawah target disebabkan karena estimasi target cukup tinggi, adanya keterbatasan

SDM di Puskesmas, keterbatasan alat dan bahan PTM, kurangnya kesadaran masyarakat, program belum terintegrasi dengan optimal.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - e) Penyediaan alat tulis kantor
  - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - i) Penyediaan peralatan rumah tangga
  - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - k) Penyediaan makanan dan minuman
  - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - m) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
  - n) Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan
  - o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional
  - c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kesehatan
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan Perencanaan kegiatan dan pelaporan
- 4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
  - b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
  - c) Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional
  - d) Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Pratama
  - e) Peningkatan Upaya Kesehatan Rumah Sakit Pratama

- 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
  - b) Pengembangan Desa Siaga
  - c) Penyuluhan Masyarakat Melalui Sekolah
  - d) Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - a) Peningkatan Kualitas Air dan Lingkungan
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - a) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
  - b) Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan sekolah
  - c) Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - d) Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
  - e) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - a) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
  - b) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
  - c) Peningkatan standar perijinan pelayanan kesehatan
- 10) Peningkatan standar perijinan pelayanan kesehatan
  - a) Pembangunan Puskesmas
  - b) Pengadaan sarana prasarana Puskesmas yang diadakan
- 11) Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
  - a) Pembangunan Rumah Sakit
- 12) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  - a) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- 13) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular
  - a) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Deteksi dini penyakit tidak menular
- 14) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Perayaan hari-hari besar nasional
3. Realisasi Program/Kegiatan yang **melebihi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
  - 1) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hal ini disebabkan karena persiapan

Kabupaten Karangasem menuju UHC sehingga perlu penyiapan SDM yang sesuai standar pelayanan.

- 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan adanya peningkatan kasus gigitan dan berkurangnya stok vaksin di Provinsi sehingga dan dalam upaya pencegahan PTM (penyakit tidak menular) Pemerintah Kabupaten Karangasem mengambil kebijakan melalui Dinas Kesehatan agar dilakukan pengadaan VAR/SAR dan vaksin kanker servic.
- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, realisasi melebihi target yang ditentukan hal ini disebabkan karena dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang pedoman akreditasi laboratorium kesehatan dan pelaksanaannya baru dioptimalkan sehingga menuntut peningkatan kinerja dari pelayanan laboratorium Kabupaten Karangasem.
  - b) Kegiatan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), capaian melebihi target karena mulai tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen akan mengoptimalkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC) yang sudah dideklarasikan oleh Bupati Karangasem awal tahun 2019 bahwa Kabupaten Karangasem UHC.
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia  
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, melebihi target karena adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja, adanya kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam UKBM (upaya kesehatan berbasis masyarakat)
  - b) Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Olahraga capaian melebihi target yang ditentukan karena dalam upaya menurunkan angka kesakitan penyakit tidak menular melalui program kesehatan olahraga.

- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat  
 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, merupakan harapan kita semua agar tidak ada lagi masalah gizi di masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal.
  - 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat  
 Peningkatan Kualitas Air dan Lingkungan, khususnya pada indikator Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis, tahun 2018 semua RS dan Fasyankes Pemerintah sudah mengelola limbahnya dengan baik.
  - 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  
 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah pada indikator Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon, dengan adanya dukungan anggaran dari pusat sehingga semua sinyal kewaspadaan sudah direspon.
  - 9) Program Pengadaan, Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya  
 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu, capaiannya di bawah target karena kurangnya dukungan anggaran
  - 10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia  
 Pelayanan pemeliharaan kesehatan, merupakan indikator SPM bidang kesehatan di mana pencapaiannya haru 100%
  - 11) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  
 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, beberapa indikatornya merupakan indikator SPM bidang kesehatan dengan target capaian 100%
  - 12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular  
 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Deteksi dini penyakit tidak menular, merupakan indikator SPM bidang kesehatan dengan target capaian 100%
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 1) Kurangnya dukungan anggaran
  - 2) Belum optimalnya di dalam melakukan evaluasi dan perencanaan suatu kegiatan

- 3) Kurangnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya dalam preventif, promotif dan kuratif
- 4) Kurangnya peran serta stakeholder dalam bidang kesehatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program yang sudah mencapai target adalah meningkatkannya derajat kesehatan, sedangkan capaian program yang belum mencapai target, perlu diupayakan agar ada peningkatan capaian setiap tahunnya, karena sehat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :
  - 1) Perencanaan penganggaran mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
  - 2) Perencanaan penganggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis situasi dan usulan kebutuhan pelayanan masyarakat
  - 3) Mengutamakan kegiatan penggerakan masyarakat dan peran lintas sektor dalam bidang kesehatan

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel T-C.30 terlampir.

Berdasarkan evaluasi capaian SPM tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dengan target indikator masing-masing sebesar 100%, di mana sebesar 58,33% belum mencapai target. Berikut disampaikan faktor yang menyebabkan belum tercapainya beberapa indikator SPM tahun 2018 adalah :

1. Rendahnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan
2. Kurangnya tenaga sehingga beberapa petugas Puskesmas yang melakukan tugas rangkap
3. Kurangnya peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam penggerakan masyarakat untuk datang ke pelayanan kesehatan.

4. Kurangnya prasarana dalam melakukan pelayanan khususnya dalam pencapaian SPM

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, di samping tanggung jawab individu dan keluarga. Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem sampai pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam visi dan misi. Dengan berpedoman pada hal tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Karangasem dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem yang ditinjau dari :

- 1) Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
- 2) Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2020
- 3) Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 4) Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Bali
- 5) Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rakerkesda Provinsi Bali yang dilaksanakan pada 25-26 Maret 2019 di b Hotel & Spa tersebut, Sekretaris Daerah Provisni Bali menyampaikan ada 5 isu strategis bidang kesehatan secara Nasional yang harus focus untuk dikerjakan di Provinsi Bali antara lain :

- 1) Peningkatan penyakit tidak menular yang dilihat dari peningkatan penyakit diabetes dan stroke.
- 2) Percepatan penurunan AKI dan AKN.
- 3) Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi.
- 4) Stunting. Angka stunting di bali masih tinggi 19,1 % walaupun lebih baik sedikit dari target WHO dengan fakta di lapangan di antaranya masih ditemukannya balita stunting.
- 5) Eliminasi TBC.



Berdasarkan karakteristik masyarakat dan capaian kinerja bidang kesehatan tahun 2018 maka dirumuskan isu strategis di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan
2. Universal Health Coverage
3. Masih tingginya kasus penyakit menular dan kecenderungan penyakit tidak menular
4. Masih ditemukan kematian ibu, anak dan Balita
5. Masih ditemukan kasus gizi kurang dan Balita stunting

Dari beberapa isu strategis di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2020 sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan periode tahun 2020.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya. Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karangasem terdapat 17 (Tujuh Belas) Program dan 69 Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan setelah dilakukan analisis kebutuhan secara umum jumlah dan jenis program/kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD namun masih kurang di dalam kecukupan anggaran seperti yang tertuang dalam tabel T-C.31 terlampir.

Kebutuhan anggaran pada beberapa program dan kegiatan setelah dilakukan analisis kebutuhan disebabkan oleh beberapa antara lain :

1. UHC (universal health coverage), salah satu tujuan dari UHC adalah agar masyarakat terlindungi dari risiko finansial, memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan penerima layanan dan Pemerintah Kabupaten Karangasem mendeklarasikan UHC di tahun 2019 sehingga perlu penambahan anggaran pada kegiatan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebesar Rp. Rp. 33.654.879.981.

2. Dengan adanya UHC diharapkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus cukup baik sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan semakin baik dan Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Kesehatan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan SDM pada UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas, Laboratorium, RS Pratama) sehingga perlu diberikan anggaran tambahan pada semua kegiatan di UPTD tersebut.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan terhadap program/kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Karangasem selain melalui hasil Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten penelaahan usulan juga melalui kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karangasem. Namun berdasarkan hasil penelaahan Dinas Kesehatan tentang usulan kegiatan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan Musrenbang (desa, kecamatan, kabupaten) sebagian besar sudah sesuai dengan program/kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan namun dalam penganggaran tahun 2020 masih kurang. Berikut kami sampaikan penelaahan tersebut pada tabel T-C.32 terlampir

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Program lingkungan sehat
- 3) Program upaya kesehatan masyarakat
- 4) Program pencegahan dan pemberantasan
- 5) Program perbaikan gizi masyarakat
- 6) Program obat dan perbekalan kesehatan
- 7) Program pengembangan obat asli Indonesia

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2020, di mana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem dapat menyentuh sasaran yang tepat.

#### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 Dinas Kesehatan merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karangasem pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 antara lain :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem  
Tahun 2018 – 2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
				2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga	Persentase Rumah Tangga <b>Berperilaku</b> Hidup Bersih dan Sehat	80	82	84	88
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Menyelenggarakan kesehatan dasar yang memuaskan di Puskesmas	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	<1	<1	<1	<1
3	Menurunkan kesakitan akibat penyakit	Menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 pdd)	<1	<1	<1	<1
			Angka Kesakitan Kusta (per 10.000 pdd)	50	50	50	50
			Angka Kesakitan Demam Berdarah (per 100.000 pddk)	15,4	15,4	15,4	15,4
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (Persen)	<1	<1	<1	<1

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
				2018	2019	2020	2021
4	Meningkatkan jumlah, jenis , mutu dan penyebaran sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.	Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang professional, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	50	60	70	80
			Persentase prasarana kesehatan dalam kondisi baik	50	60	70	80
			Persentase sarana kesehatan dalam kondisi baik	50	60	70	80
5	Terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Manajemen Pelayanan dan Pembangunan Kesehatan	Persentase pelaksanaan manajemen kesehatan	100	100	100	100

### **3.3. Pogram Dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2020 adalah :

1. Pencapaian SPM bidang kesehatan
2. Pencapaian visi dan misi Bupati Karangasem
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Karangasem
4. Pencapaian SDGs

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem pada Rencana Kerja Tahun 2020 terdapat 17 Program dan 69 Kegiatan pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dapat dilihat dalam tabel T-C.33 terlampir.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2020 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah kebijakan tahun 2020 dalam RPJMD. Untuk mencapai sasaran tersebut, program prioritas Dinas Kesehatan tahun 2020 adalah pencapaian SPM bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki 17 Program dan 69 Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dengan RKA tahun 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh hasil kinerja berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan pencapaian beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target di tahun 2018 melalui peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kemandirian dalam bidang kesehatan khususnya dalam hal preventif dan promotif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif
2. Mengupayakan anggaran kesehatan dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan peran lintas sektor dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan kualitas SDM kesehatan.